

PRAKTIK PERADILAN MENANGANI
KASUS-KASUS
HUKUM ADAT
SUKU-SUKU
NUSANTARA

OLEH :
Dr. H.P. PANGGABEAN, S.H., M.S.



BHUANA ILMU POPULER
KELOMPOK GRAMEDIA

DAFTAR ISI

Kata Sambutan Ketua M.A.R.I (Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H.,M.H.).....	v
Kata Sambutan Prof. Dr. H. Jimly Asshiddiqie, S.H.,M.H. (Mantan Ketua M.K.).....	ix
Kata Sambutan Prof. Dr. B.A. Simanjuntak (Dosen Antropologi USU)	xi
Kata Sambutan Ketum LABB (Lembaga Adat Budaya Batak).....	xvi
Kata Sambutan Ketum Dewan Mangaraja LABB (Lembaga Adat Budaya Batak)	xvii
PRAKATA	xviii
BAB I LATAR BELAKANG	1
A. Inspiratoria Penerapan Hukum Adat Suku	1
B. Landasan Yuridis Penerapan Hukum Adat Suku	2
C. Sikap Negara tentang Peranan Hukum Adat Suku	3
1. Posisi hukum kebiasaan (adat suku)	4
2. Sengketa hak waris wanita Batak dalam praktik peradilan ...	5
D. Peranan Hukum Adat Suku pada Pemerintahan Hindia Belanda	7
E. Landasan Etika Dalam Aspek Agama.....	8
F. Hak Masyarakat Hukum Adat (MAHUDAT) dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)	10
G. Perspektif Revitalisasi Badan Peradilan Adat Melalui	11
Ulasan Beberapa Penulis:	
1. Kompas, 4 Juli 2019: Pemberlakuan Hukum Adat Diperdebatkan	11
2. Tempo, 4 Juli 2019: Memahami Delik Korupsi RUKUHP	12
3. Aspek Pemidanaan Restoratif (Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H.,M.H.).....	13

H. Kapita Selekta Hukum Pidana Adat Suku	16
I. Bagan Penanganan Konflik Pemilikan/Penguasaan/ Pengelolaan Tanah Ulayat Suku-Suku Nusantara	37

BAB II PENGERTIAN..... 43

A. Yurisprudensi	43
1. Pengertian Yurisprudensi	43
2. Posisi Yurisprudensi dalam Proses Pembangunan Hukum	45
3. Manfaat Analisis Yurisprudensi Mahkamah Agung	47
4. Praktik Peradilan Menerapkan Yurisprudensi	48
5. Fungsi Yurisprudensi	51
B. Berbagai Pengertian yang Berkaitan dengan Peranan MAHUDAT	52

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN..... 55

1. Aspek Substansial	56
2. Aspek Prosedural	57
3. Aspek Statistik	60

BAB IV EFEKTIVITAS PERANAN MAHKAMAH AGUNG..... 63

A. Fungsi (Peranan) Mahkamah Agung dalam Sistem Hukum Indonesia	63
1. Fungsi Pokok Mahkamah Agung Bersifat Peradilan Mencakup Lima Bidang	63
a. Peradilan Kasasi	63
b. Bidang Fungsi Peradilan untuk Sengketa Kewenangan Mengadili	67
c. Bidang Fungsi Peradilan untuk Sengketa Perampasan Kapal Asing oleh Kapal Perang R.I.	68
d. Bidang Fungsi Peradilan untuk Permohonan Peninjauan Kembali	70
e. Bidang Fungsi Peradilan untuk Hak Uji Materil	75

2. Fungsi Khusus Bersifat Administratif	77
3. Fungsi Tambahan Bersifat Ketatanegaraan	77
B. Peranan Pengadilan dalam Pengembangan Hukum Adat	78
C. Sikap Peradilan Mengenai Hukum Waris Adat (Buku Nurul Elmiyah, Rosa Agustina, Erman Rajagukguk)	84

BAB V PERANAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) AGRARIA DALAM MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN HUKUM

HUKUM	117
A. Konflik Mengenai Pertanahan yang Dihadapi BPN	117
1. Tipologi Sengketa Pertanahan	119
2. Sumber Penyebab Konflik Pertanahan	123
3. Akar Konflik Pertanahan	124
4. Penyelesaian Konflik	125
B. Kendala-kendala Yuridis dalam Penerapan UUPA	126
1. Prinsip Hukum terhadap Hak Ulayat	126
2. Prinsip Penguasaan Tanah oleh negara dalam UUPA	131
3. Konsep Pengadaan Tanah untuk Proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pemukiman di Daerah Pasca Gempa Tsunami di Nangroe Aceh Darusalam (NAD) dan Sumatera Utara	146
4. Prinsip-prinsip Konversi dalam UUPA	150
5. Prinsip-prinsip Jual Beli Tanah Menurut Sistem Hukum Barat dan Hukum Adat	152
6. Penerapan Unsur Keadilan dalam Pelaksanaan UUPA	153
C. Politik Hukum Wewenang Negara Menguasai Hak Atas Tanah	154
1. Posisi Hak-hak Tradisional dari MAHUDAT	154
2. Rasio Logis Kewenangan Masyarakat Hukum Adat (MAHUDAT) dalam Menguasai Hak Atas Tanah Ulayat	163
3. Usulan Revisi Undang-Undang Pokok Agraria menurut Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) dan Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA)	175

4. Berbagai Ulasan Beberapa Akademisi yang Mendukung Perubahan Konsep Hak Menguasai Negara atas Tanah yang Berkaitan dengan Perspektif Masyarakat Hukum Adat terhadap Hak Atas Tanah Ulayat.....176
5. Aspek Pemidanaan Restoratif dalam Peradilan Adat oleh Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H.180

BAB VI ULASAN SARANA PENDUKUNG PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA..... 183

- A. Gagasan Reforma Agraria yang Sedang Berjalan, (Ulasan Dr. Ronsen Pasaribu, S.H.,M.M)183
- B. Tuntutan Pemilikan Tanah Ulayat Marga-Marga dalam Seminar Inventarisasi IP4T Dalam Kawasan Hutan, 26–27 Juli 2017 di Laguboti, Sumut189
- C. Register Pembagian Tanah Ulayat Marga-Marga Batak Sejak Tahun 1932.....192
- D. Beberapa Analisis Kliping Koran.....233
 1. Mempercepat Desa Adat233
 2. Kendala Pelaksanaan Reformasi Agraria di Lapangan235

BAB VII EKSISTENSI BADAN KERAPATAN ADAT (KAN) DALAM SISTEM PERADILAN INDONESIA 251

- A. Ulasan Singkat Isi Lima PERDA Provinsi dengan Penerapan Hukum Adat Setempat251
 1. Perda Kalteng No. 16/2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalteng.....251
 2. Perda Jayapura No. 8/2016 tentang Kampung Adat256
 3. Perda Bali No. 3/2001 tentang Desa Pakraman.....258
 4. Perda Sumbar No. 7/2018 tentang Nagari261
 5. Perda Aceh No. 10/2008.....264

B. Kerapatan Adat Nagari (Sebagai Lembaga Perdamaian dalam Persengketaan Perdata Adat di Sumatra Barat, Syaifoni Abbas, SH, Cakim III PN Padang	270
C. Beberapa Putusan Peradilan Adat Pidana di Beberapa Daerah di Indonesia	276

BAB VIII PERANAN LEMBAGA ADAT BUDAYA SUKU (LABS) ATAU LEMBAGA MASYARAKAT ADAT SUKU (LMAS) MENERAPKAN PRANATA HUKUM ADAT SUKU-SUKU 283

A. Gagasan Pembentukan LABS (Lembaga Adat Budaya Suku) atau Lembaga Masyarakat Adat Suku (LMAS)	283
B. Prospek Economic Creative Desa	292
C. Analisis Kliping Koran tentang Desa Adat.....	307
D. Tanggapan Yuridis atas Pengajuan RUU Masyarakat Adat.....	311

BAB IX HIMPUNAN YURISPRUDENSI TENTANG PENERAPAN HUKUM ADAT SUKU NUSANTARA MELALUI BERBAGAI SUMBER BACAAAN..... 319

1. Hukum Adat dalam Yurisprudensi, Prof. Hilman Hadikusuma, S.H., 1994	319
a) Kasus Jual Gadai	328
b) Kasus Jual Beli Tanah.....	334
c) Kasus Jual Beli Lainnya	344
2. Modul Tabulasi Yurisprudensi, terbitan MARI Tahun 1970 – 2002.....	348
3. Beberapa Yurisprudensi bidang Hukum Waris (H.P.Panggabean dan Richard Sinaga) Tahun 2007	472
a) Yurisprudensi dari Masyarakat Kebapakan (Patrilineal)	472
b) Yurisprudensi dari Masyarakat Keibuan (Matrilineal).....	475
c) Yurisprudensi dari Masyarakat Keibu-bapaan (Parenil)	475

4. Himpunan Putusan Mahkamah Agung tentang Penerapan Kaidah Hukum Adat Suku-suku Nusantara (Dikutip dari Buku Yurisprudensi Indonesia, R. Santoso Poedjosoebroto, S.H., Penerbit Djambatan, 1964	478
BAB X KESIMPULAN DAN SARAN	487
LAMPIRAN.....	505